

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi nasional yang paling strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga menjadi tulang punggung perekonomian Nasional (Arifuddin *et al*, 2020). Menurut Nurfalin (2020) Peningkatan jumlah UMKM berpengaruh terhadap perekonomian bangsa. Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan salah satu sektor yang menyumbang PDB terbesar di Indonesia yaitu sekitar 60 persen. Selain itu, UMKM membuka peluang kerja bagi masyarakat luas sehingga mengurangi pengangguran. Kondisi tersebut sangat memungkinkan karena eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia. Alasan lainnya adalah usaha mikro dan kecil memiliki keunggulan karena memanfaatkan sumber daya alam dan padat karya, utamanya pada sektor pertanian tanaman pangan perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, dan rumah makan/ restoran.

Mengingat sifatnya yang padat karya, maka UMKM dapat secara efektif menciptakan lapangan kerja sesuai dengan tingkat kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat. UMKM juga telah terbukti mampu bertahan terhadap goncangan krisis ekonomi tahun 1997 dan tetap menunjukkan eksistensinya dalam perekonomian (Permana, 2017).

Berdasarkan data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) tahun 2018 jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99 persen dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97 persen dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1 persen, dan sisanya yaitu 38,9 persen disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01 persen dari jumlah pelaku usaha. UMKM tersebut didominasi oleh pelaku usaha mikro yang berjumlah 98,68 persen dengan daya serap

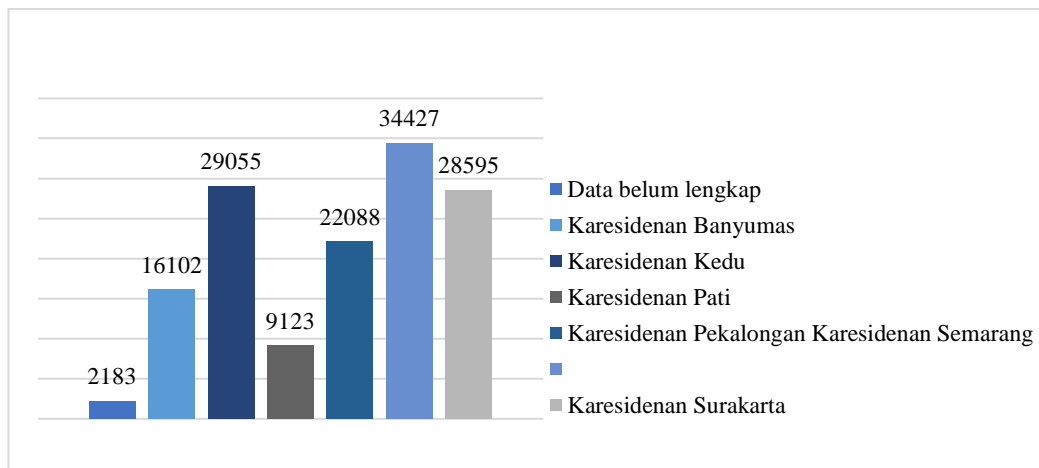
tenaga kerja sekitar 89 persen. Sementara itu sumbangan usaha mikro terhadap PDB sekitar 37,8 persen.

Dari data di atas, Indonesia mempunyai potensi basis ekonomi nasional yang kuat karena jumlah UMKM terutama usaha mikro yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja sangat besar. Basis usaha ini juga terbukti kuat dalam menghadapi krisis ekonomi. Usaha mikro juga mempunyai perputaran transaksi yang cepat, menggunakan produksi domestik dan bersentuhan dengan kebutuhan primer masyarakat. Pemerintah menyadari akan potensi UMKM tersebut, oleh sebab itu beberapa tahun terakhir ini, Pemerintah mengambil kebijakan untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro dan kecil agar dapat naik kelas menjadi usaha menengah.

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. UMKM sendiri terbagi dalam beberapa kategori, yaitu sektor pertanian, sektor peternakan, sektor perikanan, sektor kehutanan, sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor perdagangan, sektor hotel, restoran, jasa-jasa swasta, dan sektor industri pengolahan yang salah satunya mencakup industri kreatif.

Salah satu sektor yang diharapkan dapat menciptakan kesempatan kerja adalah sektor industri rumah tangga. Pada sektor industri rumah tangga teknologi yang digunakan dalam proses produksinya adalah teknologi padat karya yaitu cara untuk melakukan pekerjaan yang berdasarkan pemanfaatan tenaga kerja yang tersedia (dalam jumlah yang besar) (Amri, 2013). Dengan digunakannya teknologi padat karya maka penyerapan tenaga kerja akan lebih maksimal sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran dan pada akhirnya dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat sebagai pelaku UMKM itu sendiri.

Mukhlisin *et al.* (2016) mengemukakan bahwa upah merupakan sumber utama penghasilan seorang pekerja, sehingga upah harus cukup memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dengan wajar. Batas kewajaran tersebut dalam Kebijakan Upah Minimum di Indonesia dapat dinilai dan diukur dengan kebutuhan hidup minimum (KHM) atau seringkali saat ini disebut dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Jika suatu UMKM dapat menghasilkan keuntungan/ laba yang maksimal maka dia akan mampu membayar pekerjanya dengan upah yang tinggi. Namun laba/ keuntungan suatu usaha sangat tergantung dari pendapatan yang diperoleh dan biaya operasional yang dikeluarkan untuk menjalankan aktivitasnya. Salah satu provinsi yang memiliki jumlah Pelaku UMKM terbesar di Indonesia adalah Provinsi Jawa Tengah. Persebaran UMKM di Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut.



Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah

Gambar 1. Persebaran UMKM di karisidenan Wilayah Jawa Tengah

Berdasarkan Dinas KUKM Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas merupakan salah satu Kabupaten/ Daerah di Propinsi Jawa Tengah yang memiliki banyak potensi UMKM, dimana persebaran UMKM di Kabupaten Banyumas cukup besar sekitar 8,534 UMKM yang terdaftar di Dinas KUKM Jawa Tengah dengan potensi penyerapan tenaga kerja sebesar 2209 tenaga kerja pria dan 409 tenaga kerja Wanita.

Namun Perkembangan UMKM di Jawa Tengah tidak serta merta menunjukkan bahwa pendapatan/ omset rata-rata dari UMKM tersebut bertumbuh, bahkan ada UMKM yang justru menurun/ rugi. Tabel berikut merupakan data tentang pertumbuhan UMKM di tahun 2021 dimana data tersebut menunjukkan fluktuasi UMKM dari sisi jumlah, omset, tenaga kerja dan hutangnya. Berikut merupakan data perbandingan kenaikan/ penurunan jumlah UMKM di Wilayah Jawa Tengah dilihat dari sisi asset, omset, tenaga kerja pada tahun 2021:

Tabel 1. Data Jumlah UMKM di Jawa Tengah Tahun 2021

No	Kategori	Jumlah UMKM	Aset			Omset			Tenaga kerja		
			Turun	Tetap	Naik	Turun	Tetap	Naik	Turun	Tetap	Naik
1	Food and Beverage	28,386.00	27,278	1,101	7	27,962	418	6	22,523	5,843	20
2	Fashion	3,682.00	3,511	170	1	3,576	105	1	2,964	715	2
3	Handycraft	1,114.00	1,097	17	-	1,109	5	-	940	174	-
4	Other	11,252.00	10,539	706	7	10,878	410	4	8,038	3,210	4

Sumber: Dinas KUKM Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan tabel di atas kelompok usaha makanan/ minuman mendominasi jumlah pelaku usaha UMKM di Jawa Tengah, dimana pelaku usaha makanan dan minuman memiliki pangsa pasar yang cukup besar sehingga menjadi kelompok yang perlu menjadi perhatian karena memiliki potensi PDRB provinsi yang besar dan menjadi basis ekonomi yang dapat meningkatkan daya beli di wilayah provinsi Jawa Tengah.

Persebaran UMKM di Wilayah Jawa Tengah dilihat dari pemetaan Wilayah per Kabupaten maka potensi Jumlah UMKM yang dapat di berdayakan dan memiliki potensi terhadap distribusi pendapatan dan perekonomian daerah terdistribusi sebagai berikut.

Tabel 2. Persebaran UMKM di Wilayah Jawa Tengah

Karesidenan	Jumlah UMKM
Karisidenan Banyumas	16,102.00
Kabupaten Banjarnegara	2,864.00
Kabupaten Banyumas	8,539.00
Kabupaten Cilacap	2,099.00
Kabupaten Purbalingga	2,600.00
Grand Total	16,102.00

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Jawa tengah

Salah satu wilayah yang ada di Jawa tengah yang memiliki potensi UMKM yang cukup besar adalah Kabupaten Banyumas dimana persebaran UMKM yang cukup besar sebanyak 8,539 UMKM yang terdaftar di dinas Koperasi dan UMKM provinsi Jawa tengah, jumlah tersebut sebesar 19,23 persen dari total UMKM yang ada di Jawa tengah. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jateng, wilayah Kabupaten Banyumas memiliki potensi UMKM pangan sebanyak 6,138 UMKM atau sebesar 72,93 persen sedangkan sisanya sebanyak 2,395 UMKM merupakan UMKM non pangan.

Salah satu UMKM yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas terutama yang bergerak di bidang pangan terdapat di Kecamatan Sumpiuh, dimana di Kecamatan Sumpiuh sendiri terdapat satu sentra UMKM yang memproduksi makanan ringan klanting. Produk klanting merupakan produk local khas Kecamatan Sumpiuh, karena hanya diproduksi oleh UMKM di Kecamatan Sumpiuh dan tidak ada di wilayah lain. Beberapa penelitian terdahulu tentang UMKM banyak menemukan kendala-kendala yang secara umum terjadi di Hampir semua UMKM, bahkan tidak menutup kemungkinan juga terjadi pada UMKM Klanting di Banyumas.

Menurut Jatmika (2016), menemukan permasalahan yang dihadapi UMKM dari penelitian yang dilakukan diantaranya adalah permasalahan di bidang sumber daya manusia yaitu pelaku UMKM membutuhkan edukasi mengenai permodalan, marketing, dan keahlian yang harus dimiliki seorang pengusaha. Adawiyah (2013) mengemukakan faktor-faktor yang menjadi penghambat pertumbuhan UMKM diantaranya adalah faktor internal dan eksternal diantaranya adalah faktor finansial, faktor manajerial, dan kurangnya jaringan usaha yang dimiliki oleh UMKM

Naufalin (2020) juga menemukan bahwa Selain masalah pengelolaan SDM dan organisasi, masalah lain yang menjadi hambatan kelompok untuk maju adalah kurang gencar pemasaran produk. Pemasaran produk masih dilakukan secara konsinyasi di warung-warung maupun pusat oleh-oleh, adanya pelatihan mengenai *e-commerce* dan pemasaran digital belum mampu

merubah perilaku pemasaran yang sudah dilaksanakan selama ini. hal tersebut tentunya terkait dengan faktor internal dari masing-masing diri anggota untuk meningkatkan kemampuan dibidang pemasaran dan penguasaan teknologi pemasaran.

Menurut Gunawan (2017) bahwa proses tradisional yang dilakukan pelaku UMKM akan berdampak pada efisiensi yang tidak dapat mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Kendala yang di hadapi secara umum UMKM adalah keterkaitan dengan prospek usaha yang kurang jelas serta perencanaan, visi dan misi yang belum baik. Hal ini terjadi karena umumnya UMKM bersifat *income gathering* yaitu menaikkan pendapatan, dengan ciri-ciri sebagai berikut: merupakan usaha milik keluarga, menggunakan teknologi yang masih relatif sederhana, dan belum ada pemisahan modal pribadi dengan usaha (Ikhsani *et al*, 2020).

UMKM diharapkan dapat menghasilkan pendapatan yang maksimal dari usahanya. Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu UMKM. Bila pendapatan suatu UMKM relatif rendah, dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun rendah. Demikian pula halnya bila pendapatan dari usaha UMKM tersebut relatif tinggi, maka tingkat kesejahteraan masyarakat serta kemajuan daerah tersebut akan tinggi (Pariyanti *et al*, 2019).

Kemajuan UMKM perlu didorong oleh kinerja usaha yang kuat dan kredibel. Efisiensi dan efektivitas adalah dua cara pengukuran kinerja yang dapat dilakukan. Efektivitas merupakan ukuran untuk melihat ketepatan pencapaian tujuan kebijakan yang berorientasi pada hasil, aksesibilitas, kualitas dan kelayakan. Sementara itu, efisiensi merupakan ukuran yang berkaitan dengan penggunaan sumber suatu barang/ jasa dikatakan efisien apabila dapat menghasilkan output maksimal dengan menggunakan sejumlah input (biaya) yang minimum. (Ariyani *et al*. 2020). Menurut Yazfinedi (2018) Efisiensi menunjukkan bagaimana pelaku usaha meminimalkan biaya untuk tujuan memperoleh laba yang lebih besar, sehingga pengukuran efisiensi akan di nilai dari hasil yang di capai dan biaya yang di keluarkannya, semakin

besar hasil yang di capai dengan biaya yang semakin kecil maka UMKM tersebut dikatakan semakin efisien dalam menjalankan usaha nya. Atas dasar informasi tersebut UMKM akan melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan pendapatan dengan cara menambah jumlah produksi, memperluas cakupan pemasaran, mengoptimalkan tenaga kerja yang dimiliki, mencari bahan baku yang cukup murah, serta mulai memikirkan strategi untuk menekan biaya produksi yang dikeluarkan.

Untuk mendapatkan suatu informasi yang valid atas kinerja UMKM serta menilai sejauh mana UMKM tersebut dapat memperoleh keuntungan, apakah prinsip efisiensi telah diterapkan dengan cara memaksimalkan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan output yang maksimal, seberapa cepat titik impas atau balik modal dari nilai yang diinvestasikan untuk menjalankan usahanya, serta apakah UMKM tersebut sudah dapat memberikan kesejahteraan kepada pelaku usahanya menjadi satu point yang *related* untuk dilakukan. Berangkat dari pemikiran tersebut maka peneliti tertarik untuk menganalisis Pendapatan, Efisiensi, dan Kesejahteraan UMKM Klanting di Kabupaten Banyumas.

B. Perumusan Masalah

Industri Klanting di wilayah Banyumas mempunyai potensi untuk dapat di kembangkan, dimana industri ini mempunyai pangsa pasar yang sudah menjangkau di seluruh wilayah Banyumas dan sekitarnya, industri tersebut juga menjadi penopang utama perkenomian masyarakat sekitar, sehingga pengembangannya perlu untuk di perhatikan. Rumusan penelitian ini disusun dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah UMKM Klanting di Kabupaten Banyumas sudah menguntungkan?
2. Apakah UMKM Klanting di Kabupaten Banyumas sudah Efisien?
3. Apakah pelaku UMKM Klanting di Banyumas sudah sejahtera?

C. Pembatasan Masalah

Penelitian tentang UMKM sangat luas sehingga indikator-indikatornya perlu dilakukan pembatasan. Pembatasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Objek penelitian di batasi pada UMKM Klanting di Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas.
2. Penelitian akan berfokus pada analisa tentang pendapatan UMKM, efisiensi yang dilakukan UMKM, dan potensi UMKM tersebut memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pelaku usaha.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis keuntungan UMKM Klanting di Kabupaten Banyumas
2. Menganalisis efisiensi UMKM Klanting di Kabupaten Banyumas
3. Menganalisis kesejahteraan pelaku UMKM Klanting di Kabupaten Banyumas

Adapun kegunaan Penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis.

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna untuk menambah referensi mengenai analisis variabel yang berpengaruh terhadap kinerja UMKM khususnya melalui indikator Pendapatan, Efisiensi, dan Kebutuhan hidup layak (KHL).

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pengusaha UMKM

- a) Sebagai dasar menentukan kebijakan operasional dalam usahanya
- b) Menjadi salah satu sumber referensi untuk mengembangkan usahanya dan memaksimalkan laba usaha untuk kesejahteraan masyarakat
- c) Sebagai sarana untuk mengenalkan produk UMKM lokal di daerah Banyumas khususnya di Kecamatan Sumpiuh ke masyarakat luas agar dapat mendukung pemasaran produk kedepannya.

2. Bagi Pemerintah Setempat

- a) Sebagai salah satu referensi untuk menilai keberhasilan program pemerintah terkait usaha kecil dan menengah
- b) Rekomendasi untuk pemerintah daerah dalam membuat kebijakan yang berdampak secara luas untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Banyumas secara umum.

3. Bagi Peneliti

1. Menjadi salah satu tambahan referensi ilmiah dalam hal penelitian tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2. Dapat menjadi rujukan untuk penelitian berikutnya dengan tema UMKM.